

## KONSTELASI POLITIK ACEH PASCA MoU HELSINKI (2006-2015)

**Siti Ikramatoun**

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh  
Email: [Siti.ikramatoun@gmail.com](mailto:Siti.ikramatoun@gmail.com)

**Khairul Amin**

Program Studi Magister Sosiologi  
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe  
Aceh Indonesia  
Email: [alqonz90@gmail.com](mailto:alqonz90@gmail.com)

### **Abstract**

*The tsunami disaster in December 2004 was the momentum of Aceh peace which resulted in the Helsinki MoU on August 15, 2005. After that, the political constellation and contestation in Aceh were not dominated by national parties but was influenced by the local dimension, namely the local party and former members of the movement who are involved in practical politics. Political stages as a new means of struggle to realize the ideals of post-peace produce satisfying results, former combatants and local parties succeed in winning Aceh political contestation. its means that the people of Aceh have high expectations to local parties to build Aceh. Thus, the decline of the national party since the 2009 election shows that public trust for the national party is very low. The victory of local parties in political contestation in Aceh would certainly be a signal for national parties to make changes to accommodate local interests and movement's actors in a composition of the party in Aceh.*

**Keywords:** *Political Constellation, Local Party, Aceh*

### **Abstrak**

Peristiwa Tsunami pada bulan Desember 2004 merupakan pintu masuk penyelesaian konflik Aceh yang kemudian membuahkan hasil dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Pasca itu, konstelasi dan kontestasi politik di Aceh sudah tidak lagi didominasi oleh pusat, tetapi sudah diwarnai oleh dimensi lokal, yakni partai lokal dan mantan-mantan anggota pergerakan yang terjun ke politik praktis. Panggung politik sebagai alat perjuangan

baru mantan anggota GAM dalam mewujudkan cita-cita perjuangan pasca perdamaian membuahkan hasil yang cukup memuaskan, mantan kombatan dan partai lokal berhasil memenangkan kontestasi politik pasca perdamaian. Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa pasca damai, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap partai lokal sebagai wadah baru dalam membangun Aceh dan tidak terlalu terikat kepada pusat. Selain itu, kekalahan partai-partai nasional sejak pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai nasional yang masih “berpusat” di Jakarta sangat rendah. Kemenangan partai lokal dalam setiap kontestasi politik di Aceh tentunya menjadi sinyal bagi partai nasional untuk melakukan perubahan, yaitu mengakomodir kepentingan lokal sekaligus aktor pergerakan dalam komposisi partai agar partai nasional dapat kembali ikut memenangkan kontestasi politik di Aceh.

**Kata Kunci:** *Konstelasi Politik, Partai Lokal, Aceh, MoU*

## **A. Pendahuluan**

Kondisi sosial masyarakat Aceh masih belum stabil meski MoU Helsinki telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Berbagai ketimpangan yang diakibatkan oleh konflik panjang selama 30 tahun masih meninggalkan bekas mendalam, masih ada kecurigaan antar masyarakat Aceh, dan konflik-konflik kecil yang diakibatkan oleh kecemburuan sosial juga masih terjadi (Imparsial, 2006: 1-3). Keterbukaan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan pemerintah Indonesia untuk melangsungkan perdamaian mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama masyarakat Aceh yang mengharapkan konflik segera berakhir. MoU Helsinki juga menjadi kepuasan sendiri bagi masyarakat Aceh, selain menjadi “kontrak” perdamaian, MoU Helsinki juga diharapkan menjadi pintu untuk membangun Aceh.

Pasca Mou Helsinki, sebagaimana yang telah disepakati oleh tim juru runding GAM dan pemerintah Republik Indonesia, implementasi butir-butir MoU Helsinki akan diserahkan kepada badan legislatif, yaitu DPR-RI. Dalam proses ini, perdebatan di perlemen terjadi cukup alot, perumusan UUPA ternyata juga menuai protes di kalangan masyarakat. Isu pemekaran wilayah Aceh kembali menguat pada masa ini setelah sebelumnya sempat muncul pada tahun 2001. Pemekaran wilayah basis Aceh Tengah dan pesisir selatan kembali muncul dengan alasan penolakan terhadap UUPA (imparsial, 2006: 12-13). Namun penolakan tersebut tidak menghambat pembahasan rancangan undang-undang kekhususan Aceh tersebut yang menurut MoU Helsinki, harus diimplementasikan mulai Maret 2006. Akhirnya setelah semua pihak menemukan kesepakatan, undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh disahkan oleh DPR-RI dan ditanda tangani oleh presiden SBY tanggal 1 agustus 2006 dan berlaku mulai saat itu juga. Namun, pasca pengesahan UUPA tersebut ternyata polemik masih berlanjut. Pro kontra kembali terjadi terkait limplementasi UUPA, terutama terkait dengan butir-butir MoU yang tertuang dalam UUPA.

Secara sosiologis, MoU Helsinki dan UUPA telah merubah sendi-sendi sosial politik dan ekonomi masyarakat Aceh. Kontestasi politik Aceh berubah setelah MoU dan UUPA memberikan kekhususan kepada Aceh, terutama bagi mereka mantan pelaku konflik untuk terjun ke politik praktis. Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka diberikan hak untuk membentuk partai politik yang berbasis etnis atau regional dan ikut dalam pemilu lokal. Hal itu

dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai imbalan untuk menghentikan perjuangan bersenjata dan menuntut kemerdekaan (Hillman, 2012). Hal ini tentu berdampak pada konstelasi politik di Aceh yang menjadi “arena pertarungan” baru pasca konflik, dan proses tersebut secara otomatis memberikan dampak yang signifikan pada dinamika kehidupan masyarakat Aceh. Untuk itu, artikel ini bermaksud mengkaji tentang bagaimana konstelasi politik Aceh pasca MoU Helsinki dalam rentang waktu 2006-2015. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus, dan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta penelusuran dokumen-dokumen yang terkait dengan tema tulisan ini.

## **B. Tsunami dan Momentum Perdamaian Aceh**

Desember 2004 merupakan momen yang tidak terlupakan bagi masyarakat Aceh, ketika gempa dan Tsunami meluluh lantakkan daratan Aceh dan membungkam konflik berkepanjangan di Aceh. Kawilarang (2010) dan Murizal Hamzah (Tornquist, 2010), menyebutkan bahwa Tsunami menjadi pintu bagi penyelesaian konflik Aceh melalui perdamaian, terutama setelah pemerintah mengumumkan bahwa rehabilitasi dapat dilaksanakan jika keamanan di Aceh terjamin. GAM dan pemerintah Republik Indonesia kemudian sepakat untuk mengadakan pertemuan dan membahas tentang perdamaian Aceh.

Beberapa pertemuan dilangsungkan, terakhir pertemuan difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) yang dipimpin oleh Marti Ahtisaari, mantan presiden Finlandia. Tim perundingan GAM terdiri dari perdana menteri GAM Malik Mahmud, menteri luar

negeri GAM Zaini Abdullah, beberapa elit GAM seperti Nur Djuli, Bakhtiar Abdullah, Nurdin AR, Irwandi Yusuf, Munawar Liza dan beberapa anggota lainnya. Tim perundingan GAM dibantu oleh penasehat politik Dr. Damien Kingsbury (Kingsbury, 2006: 165). Pemerintah Republik Indonesia mendelegasikan tim perundingan yang terdiri dari Hamid Awaluddin, Jendral Widodo AS, Sofyan Djalil, Farid Husein, dan beberapa anggota pemerintahan lainnya (Kingsbury, 2006: 23). Dalam konteks perundingan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa Jusuf Kalla yang baru terpilih sebagai wakil presiden saat itu memiliki peran penting dalam proses perdamaian ini. SBY dan Kalla memainkan *soft power* sebagai pendekatan dalam menyelesaikan konflik Indonesia saat itu, terutama konflik Ambon, Poso, dan Aceh.

Prasetyo dan Aditjondro (lihat selengkapnya dalam Tornquist, 2010: 229-276), mengatakan bahwa Kalla memainkan peran yang lebih gesit dalam proses perdamaian dibandingkan SBY. Sebagai pebisnis ulung, Kalla lebih menonjolkan prinsip-prinsip bisnis dalam menyelesaikan konflik melalui perdamaian. Namun, strategi 'perdamaian berorientasi laba', dalam bahasa Prasetyo dan Aditjondro, hanya berhasil dijalankan Kalla di Ambon dan Poso. Strategi tersebut tidak dapat dijalankan di Aceh karena keterlibatan dunia internasional dalam kegiatan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi pasca Tsunami. Strategi yang dimainkan Kalla di Ambon dan Poso juga ditolak oleh GAM. Hal itu mungkin karena GAM sudah memiliki orientasi sendiri terhadap perdamaian Aceh. Jika dikaitkan dengan perjanjian Jenewa dan kata-kata Hasan Tiro bahwa seluruh dunia akan datang membantu Aceh, itu artinya GAM punya

posisi tawar yang cukup kuat dalam hal ini, komponen masyarakat dunia menjadi “backing” GAM untuk melaksanakan perdamaian dengan mengakomodasi semua kepentingan GAM. Dalam persiapan untuk melaksanakan perdamaian, tim perundingan GAM kemudian merumuskan beberapa poin “permintaan” terhadap pemerintah Indonesia. Mereka menyiapkan plan A dan plan B sebagai opsi dalam proses negosiasi. Poin penekanan permintaan GAM adalah tentang *self-governing* Aceh, sekilas, Aceh seperti negara bagian dari Indonesia. Salah satu poinnya adalah nama provinsi Aceh akan diganti menjadi pemerintahan wilayah Aceh (*self-governing wilayah of Aceh*). Terkait hal ini, tim perundingan pemerintah republik Indonesia merasa keberatan dengan *self-governing* yang diajukan GAM karena dianggap terlalu sensitif. Persoalan ini hampir membuat jalan perdamaian buntu, namun akhirnya kedua belah pihak sepakat dengan penggunaan kata “*governing Aceh*” bagi pemerintahan Aceh (Kingsbury, 2006).

Kesepakatan itu pada akhirnya mencapai titik temunya dengan penandatanganan draft MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Kontrak sosial politik antara GAM dan pemerintah republik Indonesia ini secara umum mengatur tentang proses rekonsiliasi dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat Aceh, disamping juga mengatur tentang kekhususan bagi Aceh. Butir pertama dalam MoU menegaskan pembentukan Undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh. Melalui undang-undang ini, Aceh mendapatkan kewenangan yang luas dalam sektor publik, meskipun terbatas pada bidang tertentu (dokumen MoU Helsinki, 15 Agustus 2005).

### C. Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)

Pasca perdamaian menggema di Aceh, Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) disahkan, pihak *Aceh Monitoring Mission* (AMM)<sup>1</sup> yang bertugas mengawasi implementasi MoU mengambil beberapa langkah untuk proses rekonsiliasi dan reintegrasi, dibentuklah badan khusus untuk menaungi proses reintegrasi mantan anggota GAM, yaitu Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dengan undang-undang yang telah dibentuk tentang kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses rekonsiliasi dan rehabilitasi selanjutnya tidak hanya meleburkan mantan anggota GAM ke dalam kehidupan masyarakat Aceh, namun juga mentransformasi gerakan perjuangan dan mengantar GAM ke dalam panggung politik.

#### 1) Rekonsiliasi dan Transformasi Politik

Sebagai langkah awal proses rekonsiliasi pasca MoU, *Aceh Monitoring Mission* (AMM) meminta GAM untuk membubarkan struktur keorganisasiannya agar menghilangkan kesan 'separatisme' dari mantan anggota GAM. GAM kemudian membubarkan struktur organisasinya, dan mengubahnya menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA). KPA pada awalnya dibentuk untuk menjaga kendali dan sebagai sumber atau data informasi tentang mantan simpatisan GAM. Namun dalam perkembangannya, organisasi ini justru menjadi organisasi yang eksklusif dan elitis, tertutup bagi kelompok di luar mantan simpatisan GAM. Akibatnya dalam proses rekonsiliasi, KPA tidak hanya mengalihkan GAM dari gerakan bersenjata menjadi gerakan sipil, namun dengan berbagai

---

<sup>1</sup> *Aceh Monitoring Mission* (AMM) merupakan delegasi dari Uni Eropa untuk memantau perdamaian Aceh.

kekhususan yang tercantum dalam MoU, KPA ini juga seolah-olah berubah menjadi gerakan politik. (Basyar, 2008: 36-37, 91). Dan secara struktural, tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam susunan kepengurusan GAM dan KPA. Langkah ini dianggap praktis dan taktis untuk memudahkan konsolidasi dalam proses reintegrasi. Tugas KPA dimulai dari pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi mantan pejuang hingga berfungsi pula sebagai basis bagi organisasi dan diskusi politik. Para pemimpin GAM juga lega karena tetap menduduki posisi seperti semula, misalnya seperti panglima GAM yang beroperasi di tingkat lokal, dalam struktur KPA, ia menjabat sebagai kepala kantor KPA wilayah (Tornquist, 2010: 244).

Ketika UUPA dibentuk, qanun tentang partai politik lokal disahkan, peluang bagi GAM untuk bertransformasi menjadi partai politik lokal terbuka lebar. Akhirnya GAM dengan wadah KPA membentuk Partai Aceh (PA) dan bersamaan dengan partai politik lokal yang dibentuk GAM tersebut, muncul sejumlah partai politik lokal lain dalam kontestasi panggung demokrasi Aceh. Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM, dan KIP (Komisi Independen Pemilihan) melakukan verifikasi terhadap sejumlah partai lokal dan menyatakan hanya 6 (enam) partai lokal yang memenuhi syarat, yaitu Partai Aceh yang digawangi oleh elit GAM, Partai Aceh Aman Sejahtera yang dibentuk oleh tokoh politik senior Ghazali Abas Adan, kemudian Partai Bersatu Aceh yang dipimpin oleh Ahmad Farhan Hamid, Partai Daulat Aceh yang diinisiasi oleh kelompok ulama, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Dua partai terakhir dibentuk oleh mahasiswa yang aktif dalam gerakan 98 dan referendum. Keenam partai politik

lokal tersebut memiliki konstituen masing-masing yang menjadi basis sosial di masyarakat. Mereka mendapatkan kesempatan bertarung dalam pemilihan legislatif tahun 2009 (Gade, 2012: 60-63; Kawilarang, 2010: 183-205).

Bagi GAM, partai lokal menjadi wadah perjuangan yang baru, dengan sedikit mengubah haluan dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik. GAM mendirikan Partai Aceh sebagai wadah partisipasi politik. Partai Aceh pada awalnya bernama partai GAM dengan lambang yang persis dengan bendera Aceh Merdeka. Nama GAM beserta lambangnya mendapat penolakan dari Jakarta karena berlawanan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa nama dan lambang partai politik tidak boleh mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan separatisme. Hal ini mengecewakan GAM pada mulanya, namun akhirnya mereka mengubah nama dan lambang benderanya menjadi Partai Aceh. Partai ini secara otomatis didukung oleh sebagian besar mantan pejuang gerakan Aceh merdeka, terutama yang berada di tiga wilayah pesisir utara Aceh yang menjadi basis GAM semasa konflik. GAM menyadari bahwa sebagian besar masyarakat Aceh masih memperhitungkan ulama dan mereka menyadari persaingan dengan PDA yang didirikan oleh kelompok ulama dengan basis HUDA, wadah organisasi ulama tradisional Aceh. Oleh karena itu, GAM membentuk MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh) sebagai basis dukungan ulama (Kawilarang, 2010: 200-202).

Pada akhir tahun 2011, sebagian mantan anggota Partai Aceh mendeklarasikan Partai Nasional Aceh (PNA) yang digawangi oleh Irwandi Yusuf dan beberapa "pentolan" GAM lainnya seperti Sofyan

Dawood, Muharram Idris, dan lainnya. Sementara angkatan tua GAM memilih tetap berada dalam Partai Aceh yang dipimpin oleh Muzakkir Manaf. Pada fase berikutnya, PNA bahkan menjadi saingan politik PA yang paling kuat. Selain PNA, lahir pula dua partai politik lokal lainnya, yaitu Partai Damai Aceh (PDA) dan Partai Sira, untuk mengikuti pemilihan legislatif 2014 (Gade, 2012: 64).

## **2) Pemilihan Umum: GAM dalam Demokrasi**

Tahun 2004 menjadi tahun politik dan demokrasi Indonesia. Pemilihan langsung tidak hanya berlaku bagi anggota DPR namun juga pemilihan presiden. Pasca pemilu 2004, pemilihan langsung juga diberlakukan untuk pemilihan kepala daerah. Di Aceh, ini juga merupakan fase baru setelah konflik panjang membuat ketidakstabilan sosial-politik dan ekonomi Aceh. Disamping itu, adanya peraturan baru tentang pencalonan jalur independen bagi calon kepala daerah, dan eksistensi partai politik lokal mewarnai proses demokrasi Aceh yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2006, KPA sebagai wadah integrasi politik mantan anggota GAM menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pemilu. Dalam proses pencalonan kepala daerah, sempat terjadi perpecahan dalam tubuh Komite Peralihan Aceh (KPA) pusat terkait siapa yang akan diusung sebagai calon kepala daerah. Perpecahan ini terjadi antara kelompok tua yang selama konflik lebih banyak bermukim di Swedia, dengan kalangan muda yang berperang di Aceh. Kelompok tua yang dipelopori oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, dan Muhammad Usman Lampoh Awe mendukung pasangan calon Humam Hamid dan Hasbi Abdullah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Sementara kelompok muda seperti Nur Djuli, Bakhtiar Abdullah, Sofyan Dawood, mendukung pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah akhirnya mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan diusung oleh partai tersebut. Sementara pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar maju melalui jalur independen yang didukung oleh koalisi KPA dan SIRA (Torquist, 2010: 334-335).

Selain kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, ada enam pasangan calon lain yang mendaftarkan diri dalam pertarungan pilkada 2006 ini. Malik Raden berpasangan dengan Sayeg Fuad Zakaria diusung oleh koalisi beberapa partai nasional (Golkar, PDIP, Demokrat dan PKPI), kemudian pasangan Azwar Abubakar dan Nasir Djamil diusung oleh PAN dan PKS, lalu Ghazali Abbas Adan dan Salahuddin Alfata maju melalui jalur independen yang berbasiskan masyarakat sipil. Selanjutnya Partai Bulan Bintang (PBB) mengusung pasangan Iskandar Hoesin dan Saleh Manaf, gabungan partai nasional lainnya PBR, PPNUI dan PKB mengusung Tamlicha Ali dan Harmen Nuriqman. Terakhir pasangan Djalil Yusuf dan Syauqas Rahmatillah maju melalui jalur independen. Semua pasangan memiliki basis sosial masing-masing, terutama pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Demikian pula dengan pasangan yang maju melalui jalur independen, mereka juga memiliki pengaruh yang cukup kuat.

Beberapa lembaga survei memprediksikan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini akan berlangsung dalam dua putaran dan akan dimenangkan oleh pasangan calon yang diusung

oleh partai politik nasional. Menurut IFES, kondisi sosial masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami akan menghambat pasangan calon untuk mendulang suara lebih dari 26%. Sementara LSI memprediksikan bahwa pemilihan gubernur akan dimenangkan oleh pasangan calon dari partai nasional seperti Golkar dan PAN. Hal ini dipengaruhi oleh popularitas pasangan calon yang pernah mendapatkan posisi jabatan, sementara pasangan dari kalangan GAM kemungkinan akan mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok seperti kelompok anti separatis dan lainnya.

Namun pada kenyataannya, kemenangan diperoleh oleh pasangan calon yang memiliki hubungan erat dengan GAM dan maju melalui jalur independen, yaitu pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Secara sosiologis, pasangan calon tersebut tidak memiliki basis sosial politik sebagaimana partai-partai nasional pada umumnya. Keterkaitan kedua pasangan calon dengan GAM akan mengurangi dukungan dari kelompok anti separatis. Secara popularitas, keduanya juga tidak terlalu populer dibandingkan dengan beberapa pasangan calon yang pernah memiliki jabatan seperti Azwar Abubakar. Namun tak dapat dielakkan bahwa pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar tampil sebagai pasangan alternatif yang menjadi harapan baru masyarakat ketika partai-partai nasionalis dianggap lebih pro pada kepentingan Jakarta dibandingkan kepentingan rakyat. Kemenangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dalam pemilu ini merupakan proses awal reintegrasi GAM dalam sistem politik Aceh yang kemudian membawa pengaruh pada proses politik berikutnya.

### 3) Kontestasi Politik; Partai Lokal vs Nasional

Dalam tatanan Aceh yang baru pasca perdamaian, pemilihan umum legislatif Aceh sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dengan keikutsertaan partai politik lokal yang memberi warna baru dalam proses pemilihan. Pemilihan legislatif ini juga menjadi wujud pelaksanaan proses reintegrasi pasca perdamaian. Pemilihan legislatif pertama yang dilakukan pada tahun 2009 merupakan awal kebangkitan demokrasi di Aceh. Pemilihan ini diikuti oleh 34 partai politik nasional ditambah 6 partai politik lokal (Gade, 2012:64). Partai-partai nasional yang sebelumnya menguasai DPR Aceh harus bersaing dengan partai-partai lokal yang baru lahir setelah perdamaian. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi partai nasional, karena keberadaan partai nasional masih sering dikaitkan dengan politik Jakarta yang masih terkesan memarjinalkan Aceh. Kehadiran partai lokal membawa harapan baru bagi masyarakat Aceh yang terkesan lebih pro rakyat Aceh.

#### a) Pemilihan Legislatif

Dalam pemilihan umum yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 april 2009, partai Aceh menang mutlak di sejumlah kabupaten/kota di Aceh, juga di tingkat provinsi. Secara mutlak Partai Aceh menguasai hampir 50% kursi parlemen DPR Aceh. Partai Aceh mendapatkan 33 kursi dari



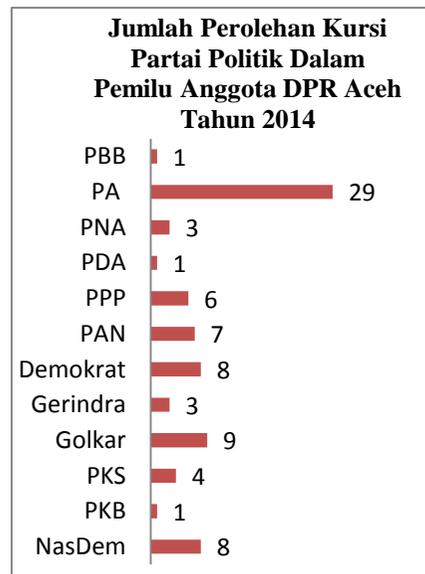
jumlah 69 kursi. Jumlah kursi yang diperoleh PA bahkan jauh

berbeda dengan kursi partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu secara nasional. Partai Aceh yang baru muncul dan pertama kali ikut dalam pemilihan legislatif mampu menggeser posisi partai-partai nasional yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik Aceh. Kemengang Partai Aceh dalam pemilihan legislatif ini menunjukkan bahwa Partai Aceh yang merupakan representasi GAM pada masa lalu masih memiliki kekuatan basis sosial yang kuat di kalangan *grassroot*, dan basis sosial tersebut erat dipengaruhi oleh kondisi konflik masa lalu.

Kemenangan PA dalam pemilu legislatif Aceh tersebut kemudian memperluas keikutsertaan mantan anggota GAM dalam politik kekuasaan Aceh. Karena selain kemenangan di legislatif, GAM bersama KPA sebelumnya juga telah memperoleh kemenangan untuk pasangan Irwandi-Nazar pada pemilihan kepala daerah tahun 2006. Di satu sisi kemenangan partai Aceh bisa saja dilihat sebagai kemenangan rakyat yang membawa harapan baru dalam pemerintahan Aceh. Namun di sisi lain, dominasi partai Aceh dan mantan pejuang GAM ini bisa dianggap membahayakan birokrasi dan sistem demokrasi Aceh. Kemenangan ini menjadi tiket untuk kembali bertarung dalam pemilihan legislatif tahun 2014.

Sebelum pemilihan legislatif tahun 2014, sebagian pendukung Partai Aceh membentuk Partai lokal baru, yaitu PNA, yang juga memiliki basis yang sama dengan PA. Secara sosiologis, konsentrasi massa yang sebelumnya menjadi basis sosial PA akan terpecah, dan tentu akan mempengaruhi perolehan suara dan kursi DPRA. Pemilihan legislatif 2014 juga sangat menentukan karena banyak

yang meramalkan bahwa partai politik lokal paling lama hanya bertahan 2 periode atau sekitar 10 tahun. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi GAM untuk mempertahankan posisi dalam struktur pemerintahan Aceh. Di tingkat nasional, KPU melakukan seleksi terhadap partai-partai politik yang akan mengikuti pemilu 2014.



Ada 12 partai yang lolos seleksi secara nasional, yaitu NasDem, PKB, PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, PAN, PDIP, Hanura, PBB, dan PKPI. Sementara di Aceh, pemilihan diikuti oleh 10 partai nasional di tambah tiga partai politik lokal yang telah lolos seleksi, yaitu PA, PNA, dan PDA. Hasil pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada 9 April 2014 ini, secara nasional dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan suara sekitar 18,95 persen suara. Hasil ini ternyata juga tidak berlaku di Aceh yang sama sekali tidak memberikan tempat kepada PDIP. Kursi DPR Aceh ternyata tetap didominasi oleh Partai Aceh yang mendapatkan 29 kursi dari jumlah 81 kursi. Jumlah ini memang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, Partai Nasional Aceh yang menjadi rival Partai Aceh hanya mendapatkan 3 kursi parlemen, dan partai lokal lainnya yang menjadi wadah politik ulama yaitu PDA hanya mendapatkan 1 kursi. Sisanya dibagi-bagi kepada beberapa partai nasional kecuali PDIP dan Hanura yang tidak mendapatkan jatah kursi parlemen Aceh.

Dengan perolehan suara yang cukup signifikan, PA kembali mendulang kemenangan dan mendominasi kursi kekuasaan parlemen Aceh. Kemenangan ini tentu berpengaruh pada setiap kebijakan yang akan ditelorkan oleh DPR Aceh. Kemenangan PA dalam dua kali pemilihan legislatif Aceh pasca perdamaian menjadi kunci penting dalam pemilu-pemilu lainnya, baik pilkada maupun pemilihan presiden. Dengan demikian, kunci kekuasaan Aceh saat ini berada di tangan Partai Aceh, tidak hanya berpengaruh pada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, namun juga berpengaruh pada berbagai proses politik Aceh.

#### **b) Pilkada tahun 2012**

Dalam UUPA pasal 65 ayat 1, tertulis bahwa kepala daerah di Aceh dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, dan dilaksanakan secara jujur dan adil. Pilkada tahun 2006 merupakan pemilihan langsung pertama bagi masyarakat Aceh yang menjadi cerminan pengimplementasian MoU Helsinki, UUPA, dan sistem demokrasi. Pemilihan kepala daerah di Aceh terbilang inovatif dengan adanya calon kepala daerah yang maju melalui jalur independen. Artinya, setiap elit lokal Aceh bisa mencalonkan diri tanpa harus berafiliasi dengan partai politik. Bahkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2006, sebagian besar kabupaten/kota bahkan provinsi Aceh dimenangkan oleh calon yang maju melalui jalur independen.

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2012, sistem pemilihan tersebut kembali berlaku. Ada lima pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, baik melalui dukungan partai politik ataupun melalui jalur perseorangan atau independen.

Hal itu juga dilakukan di sejumlah daerah di Aceh untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, ataupun Walikota dan wakil Walikota. Pemilihan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 april 2012 di seluruh Aceh. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memilih maju melalui jalur independen, yaitu Ahmad Tajuddin dan T. Suriansyah, Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan, Darni Daud dan Ahmad Fauzi. Sementara itu, dua pasangan lainnya diusung oleh partai politik yakni pasangan Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah diusung oleh koalisi partai Demokrat, PPP dan Partai SIRA, lalu pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf diusung oleh Partai Aceh. Belakangan, kandidat Partai Aceh ini ikut didukung oleh beberapa partai nasional lainnya (Gade, 2012: 98-104).

Hasil pemilihan langsung pada April 2012 secara mutlak dimenangkan oleh pasangan Zaini-Muzakkir yang diusung oleh Partai Aceh. Pasangan "Zikir" ini memperoleh 55,75% suara rakyat Aceh mengungguli pasangan rivalnya, Irwandi-Muhyan yang hanya mendapatkan 29,18% suara. Zaini merupakan mantan petinggi GAM dan Muzakkir mantan petinggi militer GAM. Keduanya akan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2012-2017. Sementara tiga pasangan lainnya, hanya mampu mengumpulkan suara kurang dari 10% suara (Gade, 2012: 106). Secara sosiologis, persebaran basis sosial pendukung sebenarnya cukup merata, hanya saja, kemenangan Partai Aceh dalam pemilu legislatif 2009 menjadi modal untuk memenangkan pasangan calon Zikir tanpa harus berkoalisi dengan beberapa partai lain. Basis Sosial partai Aceh yang kuat di level *grassroot* cukup membantu pasangan Zikir untuk

menang. Apalagi keduanya berasal dari daerah basis Partai Aceh, Zaini dari Pidie, dan Muzakkir Manaf dari Aceh Utara.

### **c) Pemilihan Presiden**

Pemilihan presiden selalu dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pemilihan legislatif. Artinya, pemilihan presiden secara langsung sudah dilakukan dua kali, yaitu tahun 2009 dan tahun 2014. Kedua pemilu ini memberikan ketegangan politik yang cukup tinggi, terutama di kalangan elit-elit politik. Di kalangan sipil masyarakat, kedua pemilu ini selalu menjadi harapan bagi keberlangsungan perdamaian Aceh. Pada pemilu 2009, ada 3 pasangan calon yang akan dipilih oleh masyarakat Indonesia, yaitu pasangan SBY-Boediono, pasangan JK-Wiranto, dan pasangan Megawati-Prabowo. Ketiga Pasangan ini tidak ada yang asing Bagi masyarakat Aceh. SBY dan JK merupakan pasangan presiden periode sebelumnya, sementara Megawati merupakan presiden kelima Indonesia yang memimpin selama masa darurat militer di Aceh. Dari berbagai prediksi yang muncul, JK akan mendapatkan kemenangan mutlak di Aceh. Hal ini mengingat JK memiliki peran yang besar dalam proses perdamaian Aceh. JK juga berulang kali membangun hubungan dengan Partai Aceh yang baru saja memangkan Pemilihan legislatif Aceh tahun 2009 (Gade, 2010: 68-69).

Pada kenyataannya, hasil penghitungan suara di Aceh setelah pemilu menunjukkan bahwa pasangan SBY-Boediono menang secara mutlak dengan perolehan suara sekitar 93%. kemenangan SBY ini tidak bisa dilepaskan dari peran Partai Aceh. Tim kampanye SBY-Boediono di Aceh didominasi oleh mantan petinggi GAM seperti Sofyan Dawood dan Irwandi Yusuf. Di beberapa daerah basis GAM,

SBY menang mutlak dari Jusuf Kalla (Gade, 2010: 69-70). Partai Aceh sebagai wadah politik GAM menjadi tombak kemenangan mutlak SBY-Boediono di Aceh.

Pada pemilihan presiden tahun 2014, perbedaan mewarnai dukungan GAM kepada pasangan calon presiden. Hanya ada dua pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019, yaitu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sejak awal, PA sudah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Namun ketika KPU mengesahkan bahwa hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, suara PA menjadi pecah. Kelompok tua GAM yang tergabung dalam Tuha Peuet<sup>2</sup> Partai Aceh seperti Zaini Abdullah, Malik Mahmud dan Zakaria Saman, memilih untuk mendukung Jokowi-JK. Sementara kelompok muda yang dipelopori oleh Muzakkir Manaf tetap mendukung pasangan Prabowo-Hatta (Lintas Gayo, 5 Juni 2014). Di sisi lain, PNA menyatakan dukungannya kepada pasangan Jokowi-JK dengan dalih bahwa JK memiliki jasa bagi perdamaian Aceh, sehingga diyakinkan akan menjaga perdamaian Aceh dan merealisasi semua turunan UUPA. Hasil pemilu menunjukkan perolehan suara Prabowo-Hatta unggul tipis dari perolehan suara pasangan Jokowi-JK. Prabowo-Hatta mendulang 54,39% suara, sementara pasangan Jokowi-JK mengumpulkan 45,61% suara. Pasangan Prabowo-Hatta tidak mendapatkan kemenangan

---

<sup>2</sup> *Tuha Peuet* merupakan pembina. Ini merupakan istilah yang dipakai pada zaman kerajaan bagi mereka yang menduduki posisi penasehat. Dalam struktur Partai Aceh, istilah Tuha Peuet tidak jauh berbeda maknanya dengan yang dipakai pada masa kerajaan, Tuha Peuet Partai Aceh merupakan Pembina atau Penasehat Partai yang terdiri dari angkatan tua GAM

mutlak seperti pasangan SBY- Boediono yang juga didukung oleh Partai Aceh. Hal ini dapat dipahami mengingat suara di tingkatan elit Aceh sudah pecah, maka tentu akan berpengaruh pada dukungan di tingkatan *grassroot*.

#### **D. Penutup**

Tsunami merupakan pintu bagi penyelesaian konflik Aceh yang kemudian mencapai titik temu dengan ditanda tangannya draft MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Pasca itu, UUPA dibentuk, qanun tentang partai politik lokal disahkan dan GAM bertransformasi menjadi partai politik lokal, lalu muncul pula sejumlah partai politik lokal lain. Sejak itu, konstelasi dan kontestasi politik di Aceh sudah tidak lagi didominasi oleh pusat, tetapi sudah diwarnai oleh dimensi lokal yang berupa partai lokal dan mantan-mantan anggota pergerakan atau GAM.

Kemenangan Partai Aceh (PA) sebagai representasi GAM dalam berbagai pemilihan umum di Aceh pasca perdamaian, menunjukkan bagaimana masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap GAM dalam membangun Aceh dan tidak terlalu terikat kepada pusat. Panggung politik sebagai alat perjuangan baru dalam mewujudkan cita-cita perjuangan pasca perdamaian membuahkan hasil yang cukup memuaskan, kontestasi politik yang terjadi berhasil dimenangkan. Namun, konstelasi politik yang dinominasi oleh mantan anggota pergerakan secara empiris ternyata belum mampu membawa Aceh keluar dari berbagai problem sosial. Konflik memang telah selesai, tetapi masalah sosial yang berupa kemiskinan dan pengangguran masih belum mampu diatasi meski pemangku kebijakan di parlemen maupun eksekutif adalah mereka yang dulu

memperjuangkan itu. Ruang-ruang kekuasaan yang dihuni oleh mantan kombatan sepertinya berhasil “menjebak” dan membawa mereka keluar dari cita-cita luhur perjuangan, sehingga meski mereka telah berkuasa namun masyarakat masih tetap menderita.

Selain itu, kekalahan partai-partai nasional sejak pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai nasional yang masih “berpusat” di Jakarta sangat rendah. Partai-partai nasional yang dianggap terlalu mengakomodasi kepentingan Pusat dan sering kali mengabaikan kepentingan rakyat membuat masyarakat Aceh lebih memilih partai lokal. Munculnya GAM dalam politik kekuasaan Aceh dalam bentuk partai lokal kemudian menjadi harapan masyarakat Aceh pasca MoU, yaitu harapan akan lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat Aceh dengan pendekatan keacehan. Kemenangan demi kemenganga partai lokal tentunya menjadi sinyal bagi partai nasional untuk bisa mengakomodir kepentingan lokal dan sekaligus aktor pergerakan dalam komposisi partai agar partai nasional dapat kembali ikut memenangi kontestasi politik di Aceh saat ini.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Basyar, M. Hamdan (ed). 2008. *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gade, Fakhurradzie (ed.). 2012. *Rekam Jejak Demokrasi Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Hadi, Amirul. 2010. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hartmann, Michael. 2007. *The Sociology of Elites*. Oxon: Routledge
- Hillman, Ben. (2012). Ethnic Politics and Local Political Parties in Indonesia. *Asian Ethnicity*, Vol. 13, No. 4: 419–440

- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (Robert M.Z. Lawang, Penerjemah). Jakarta: Gramedia
- Kawilarang, Harry. 2008. *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Bandar Publishing
- Kingsbury, D. 2006. *Peace in Aceh: a Personal Account of the Helsinki Peace Process*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Lane, J.-E., & Ersson, S. 2000. *The New Institutional Politics: Performance and outcomes*. London: Routledge.
- Lipset, Seymour Martin. 2007. *Political Man: Basis Sosial tentang Politik* (Endi Haryono, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Neuman, W. Laurence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik* (7th ed.) Jakarta: PT Gramedia
- Tornquist, Olle (ed.). 2011. *Aceh: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*. Yogyakarta: PCD Press

### **Dokumen**

Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, perjanjian RI-GAM tahun 2005 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

### **Situs Internet dan Media Online**

<http://aceh.tribunnews.com/>  
<http://atjehpost.co>  
<http://www.bandaacehkota.go.id/>  
<http://www.sinarharapan.co/>